

ABSTRAK

Provinsi Jawa Tengah menerapkan kebijakan pengembangan wilayah melalui pembentukan Wilayah Pengembangan (WP) sebagai upaya mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat keterkaitan antarwilayah. Dalam perkembangannya, revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 memunculkan perubahan struktur WP melalui pemekaran beberapa wilayah pengembangan baru. Namun demikian, perubahan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh kajian mengenai keterkaitan fungsional antarwilayah serta pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik perwilayahan fungsional pada Wilayah Pengembangan di Jawa Tengah serta menganalisis hubungan antara perwilayahan fungsional dengan kondisi ekonomi wilayah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan skala tahunan dan triwulanan, data jaringan jalan, jumlah penduduk, serta dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), Esteban-Marquillas Shift-Share, serta analisis P-Median (Minimize Weighted Impedance). Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi sektor basis, tingkat daya saing wilayah, struktur pusat pertumbuhan, dan keterkaitan ekonomi antarwilayah dalam masing-masing WP.

Hasil penelitian menunjukkan adanya tren similaritas makro berupa transformasi struktural dari sektor primer menuju sekunder-tercier yang didorong oleh lonjakan daya saing bersih (Nett Shift positif) pada sektor pariwisata secara masif serta perluasan sabuk industri manufaktur dan jaringan logistik. Sebaliknya, hampir seluruh wilayah kabupaten mengalami gejala agri-paradox homogen pada sektor pertanian yang tetap memegang nilai spesialisasi tinggi ($LQ > 1$) namun merekam tren de-akselerasi pertumbuhan eksternal bersih. Dari tinjauan spasial, pemodelan P-Median membuktikan bahwa sistem jaringan jalan berhasil mengalokasikan rute optimal bagi 464 kecamatan, namun menyisakan residu sebanyak 112 kecamatan yang tidak teralokasi (blank spot) serta meluasnya fenomena spatial mismatch, di mana aliran logistik rill bergerak lintas batas (cross-boundary) menembus batas administratif blok WP. Kajian ini merekomendasikan perlunya restrukturisasi batas deliniasi WP masa depan agar bertransisi dari pendekatan wilayah formal-administratif menuju pendekatan wilayah fungsional yang adaptif, disertai penguatan konektivitas prasarana jalan pengumpan (feeder) pada kecamatan yang terisolasi demi menekan biaya logistik regional.

Kata Kunci: Perwilayahan Fungsional, Wilayah Pengembangan, Pertumbuhan Ekonomi, Keterkaitan Wilayah, P-Median.